

DIPA FAKULTAS

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) NON ALAMI DI PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG.

Oleh:

Armijon, S.T.,M.T. NIP 19730410 2008011008
Ir. Priyo Pratomo, M.T NIP 195309261985031003
Ir. Margareta Welly, M.T NIP 195504021990032001

**PRODI D3 TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul : Analisis Dan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Non Alami Di Perkotaan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2. Bidang Penelitian : Penerapan IPTEK
3. Ketua Tim Pengusul :
- a. Nama Lengkap : Armijon, ST., MT.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197304102008011008
 - d. Disiplin Ilmu : Teknik Geodesi
 - e. Golongan : IIIb
 - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - g. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
 - h. Alamat Kantor : Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung, Lampung Kode Pos 35145
 - i. E-mail : armijon@gmail.com
 - j. Alamat Rumah : Jl. Samratulangi GG. Teratai No 16 – Gedong Air – Tanjung Karang Barat
 - k. Hp : 081273360000
4. Anggota Tim : 2 Orang
- a. Nama Anggota 1 : Ir. Priyo Pratomo, M.T
 - b. Nama Anggota 2 : Ir. Margareta Welly, M.T
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
6. Jumlah Biaya : Rp 5.000.000,00
7. Sumber Dana : Dipa Fakultas Unila TA 2016

Bandar Lampung, 30 November 2016

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Gatot Eko Susilo, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP 197009151995031006

Menyetujui :
Ketua LPPM Unila



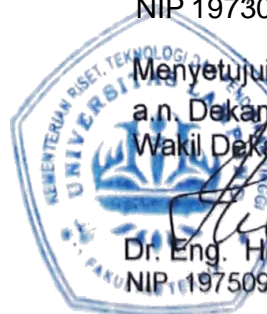
Warsono, M.S, Ph.D
NIP 196302161987031003

Ketua Tim,



Armijon, S.T., M.T
NIP 197304102008011008

Menyetujui :
a.n. Dekan FT Unila
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Eng. Helmy Fitriawan, ST, MSc
NIP 19750928200112100

ABSTRAK

Pertambahan jumlah penduduk yang makin meningkat memerlukan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas, telah mengarah ke daerah yang makin jauh ke tepian kota. Hal ini mengakibatkan peralihan tata guna lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan binaan (budidaya) maupun kawasan alami di perkotaan berlandaskan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam pelaksanaan pembangunan kota, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung dan bekerjasama demi tercapai tujuan pembangunan kota yang berkesinambungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat ditingkatkan bila komunikasi antar pemangku kepentingan lebih intensif dan para pemangku kepentingan mendapat informasi yang holistik dan dapat diperbarui secara berkesinambungan. Berdasarkan hal – hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu identifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau RTH Publik di perkotaan yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. pada penelitian ini akan dilakukan analisis dan identifikasi terhadap ketersediaan RTH non alami di perkotaan, khususnya pada ibukota Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung untuk mewujudkan ruang-ruang kota yang lebih berkualitas, indah, nyaman, sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau di provinsi Lampung.

Pelaksanaan penelitian ini meliputi kajian metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data, termasuk kajian kepustakaan dan kajian teoritis serta studi kasus sejenis, analisis pemecahan masalah, penyiapan konsep pengembangan. Selanjutnya dengan banduan teknoogi Penginderaan Jauh dan Analisis SIG akan dihasilkan Analisis Ketersediaan, Identifikasi Kawasan, arahan lokasi prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Lampung.

Kegiatan penelitian pada kawasan perkotaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menghasilkan Identifikasinya ruang-ruang terbuka hijau di pusat-pusat ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung serta Tersusunnya arahan lokasi prioritas pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Lampung

ANALISIS DAN IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) NON ALAMI DI PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penghijauan perkotaan merupakan salah satu usaha pengisian Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan berdasarkan potensi alam yang dimiliki kawasan tersebut serta kebutuhan masyarakatnya dan rencana pemerintah setempat. Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan RTH Publik. Fokus dari pengembangan RTH perkotaan yaitu RTH Publik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain : (1) Fungsi ekologis, RTH dapat kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. (2) Fungsi sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota. (3) Fungsi arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota. (4) Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan 30% dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan preskriptif mengenai RTH tersebut harus secara eksplisit termuat dalam setiap Perda RTRW. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat UUPR pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hijau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan RTH perkotaan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, iklim mikro maupun ekologis lainnya. Bila pembangunan terus berkembang secara masif dengan mengorbankan luasan RTH, maka ekosistem kota dapat menjadi terganggu, sebagaimana

terlihat dari kejadian banjir, kekeringan dan kelangkaan air, pencemaran udara serta peningkatan iklim mikro. Pada konteks ini perlu ditegaskan kembali bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataannya, terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau secara signifikan di kawasan perkotaan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di wilayah perkotaan.

Pertambahan jumlah penduduk yang makin meningkat memerlukan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas, telah mengarah ke daerah yang makin jauh ke tepian kota. Hal ini mengakibatkan peralihan tata guna lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun, baik untuk permukiman, area komersial, kampus atau fasilitas pendidikan, industri dan seterusnya. Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan binaan (budidaya) maupun kawasan alami di perkotaan berlandaskan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dalam pelaksanaan pembangunan kota, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung dan bekerjasama demi tercapai tujuan pembangunan kota yang berkesinambungan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat ditingkatkan bila komunikasi antar pemangku kepentingan lebih intensif dan para pemangku kepentingan mendapat informasi yang holistik dan dapat diperbarui secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu identifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau RTH Publik di perkotaan yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Dalam pengertian RTH, dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, dan RTH non alami atau binaan/hasil buatan perencana, pada penelitian ini akan dilakukan analisis dan identifikasi terhadap ketersediaan RTH non alami di perkotaan, khususnya pada ibukota Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penelitian ini adalah membantu menyusun dokumen penunjang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Non Alami di Provinsi Lampung yang pada gilirannya dapat membantu mewujudkan penyelenggaraan penataan Ruang Terbuka Hijau, guna mencapai ruang-ruang perkotaan yang lebih berkualitas, indah, nyaman, sehat dan berkelanjutan serta menumbuhkan

kembangkan kepedulian terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan tujuan penelitian ini mengharapkan terwujudnya ruang-ruang kota yang lebih berkualitas, indah, nyaman, sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau di provinsi Lampung.

1.3 RUANG LINGKUP

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada kawasan perkotaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Teridentifikasi ruang-ruang terbuka hijau di pusat-pusat ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung. Tersusunnya arahan lokasi prioritas ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Lampung.

1.4 DASAR HUKUM

- 1) KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika selatan 10 tahun kemudian (2002) disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.
- 2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 126 (b) mengamanatkan bahwa kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial ekonomi termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.5 HASIL AKHIR

Hasil penelitian ini adalah tersusunnya informasi-informasi sebagai berikut:

1. Metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data, termasuk kajian kepustakaan dan kajian teoritis serta studi kasus sejenis, analisis pemecahan masalah, penyiapan konsep pengembangan.
2. Gambaran umum daerah penelitian.
3. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Provinsi Lampung
4. Identifikasi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Provinsi Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN LITERATUR RTH

Mengacu pada Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Permen PU No 5 Tahun 2008), terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Provinsi Lampung, terkait dengan tujuan, fungsi, dan manfaat penyelenggaraan RTH.

A. Tujuan Penyelenggaraan RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH perkotaan, diantaranya meliputi: (1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; (2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; (3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

B. Fungsi RTH

- Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: (1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); (2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; (3) sebagai peneduh; produsen oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; penahan angin.
- Fungsi Tambahan (ekstrinsik) yaitu: (1) Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. (2) Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. (3) Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

C. Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas: (1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); (2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

D. Tipologi RTH

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat lihat Tabel 2.1.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Pembagian Jenis-Jenis RTH Publik dan RTH Privat

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	d. Taman Kecamatan	V	V
	e. Taman Kota	V	
	f. Hutan Kota	V	
	g. Sabuk Hijau (<i>green belt</i>)	V	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	

Sumber : Permen PU No 5 Tahun 2008

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan

fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan:

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	Pengamanan wilayah pantai , Sosial budaya ; Mitigasi bencana	Berdasarkan luas wilayah Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	Konservasi tanah; Konservasi air; Keanekaragaman hayati	Berdasarkan luas wilayah Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	Mitigasi/evaluasi bencana	Berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d sedang	Dasar perencanaan kawasan sosial	Berdasarkan fungsi tertentu Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	Ekologis; Sosial; Hidrologis	Berdasarkan fungsi tertentu Berdasarkan jumlah penduduk

Sumber : Permen PU No 5 Tahun 2008

1.2. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW PROVINSI LAMPUNG

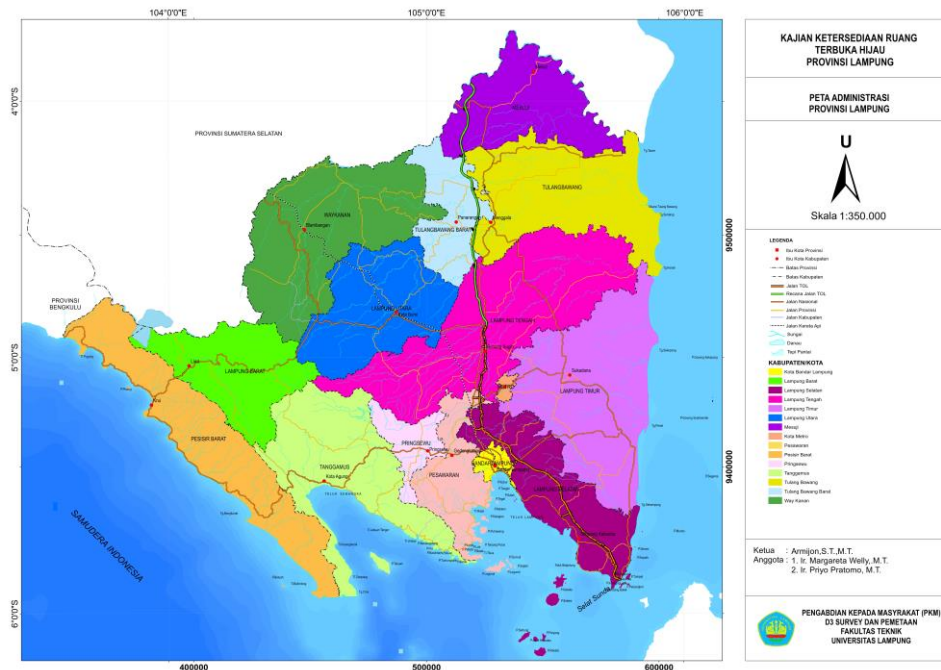
A. Rencana Pola Ruang Provinsi

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada RTRWP Lampung mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan yaitu:

- a. Kawasan hutan lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan;
- b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa pantai Timur Selatan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian di atas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air ke dalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian Timur dan Barat yang membentang dari Utara ke Selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh dan kawasan hutan lainnya.

- d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Kota Metro, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara dan Lampung Selatan).
- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat 355.84 km².
- f. Kawasan perlindungan laut/zona inti di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Rencana pola peruntukan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukkan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan.



Sumber : RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029
 Gambar *Error! No text of specified style in document..1* Peta Pola Ruang Provinsi Lampung

B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pertamanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Provinsi Lampung memiliki dua Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu; (1) Kawasan Selat Sunda, dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi dengan tersambungny Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. (2) Kawasan Perbatasan Negara di pesisir Timur Provinsi Lampung yang berhadapan dengan laut lepas/Samudra Hindia dengan fungsi strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat pertumbuhan (Kota Bandar Lampung) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya oprimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi.

C. Arah Pemanfaatan Ruang Provinsi

Arah pemanfaatan ruang berupa prioritas pemanfaatan yang mempertimbangkan segi pendanaan, peran penting dari struktur ruang, pola ruang dan kawasan srategis bagi pengembangan Provinsi Lampung. Prioritas pengembangan tersebut diwujudkan dengan

indikasi program utama yang disusun hingga lima tahun kedepan. Pelaksanaan pembangunan mengedepankan prinsip pembiayaan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang sehat seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber lain yang sah. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang bekerja sama aktif dengan pemerintah Provinsi, Nasional, instansi-instansi terkait lainnya, serta melibatkan peran aktif masyarakat sebagai aktor pembangunan.

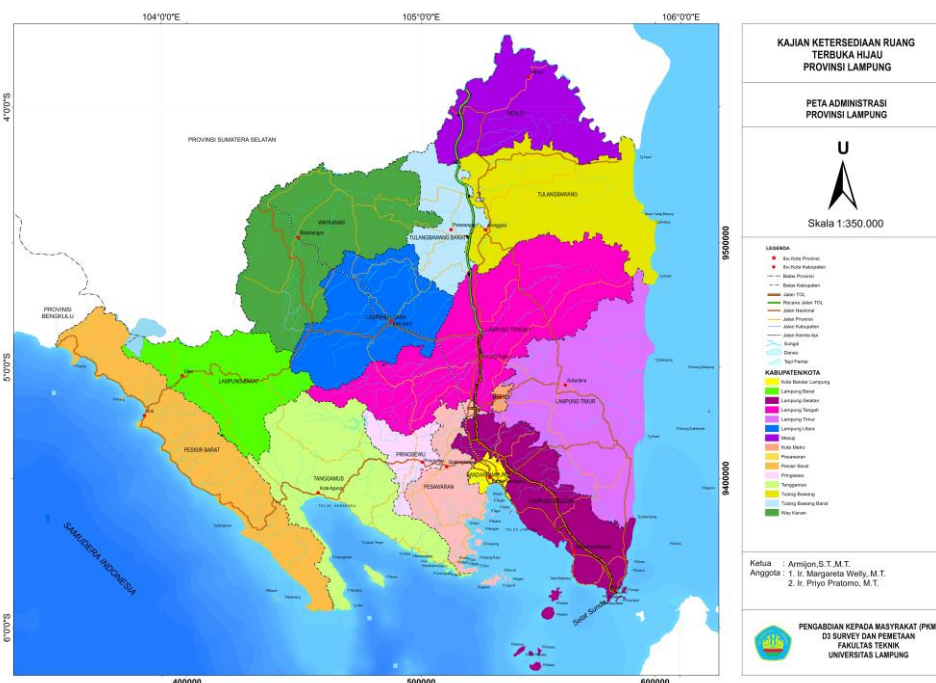
D. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi prinsip pengendalian pemanfaatan ruang, indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan pemberian sanksi.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1 LETAK GEOGRAFIS

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 188 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km. Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu untuk sebelah Selatan dengan Selat Sunda sedangkan sebelah Timur dengan Laut Jawa serta Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

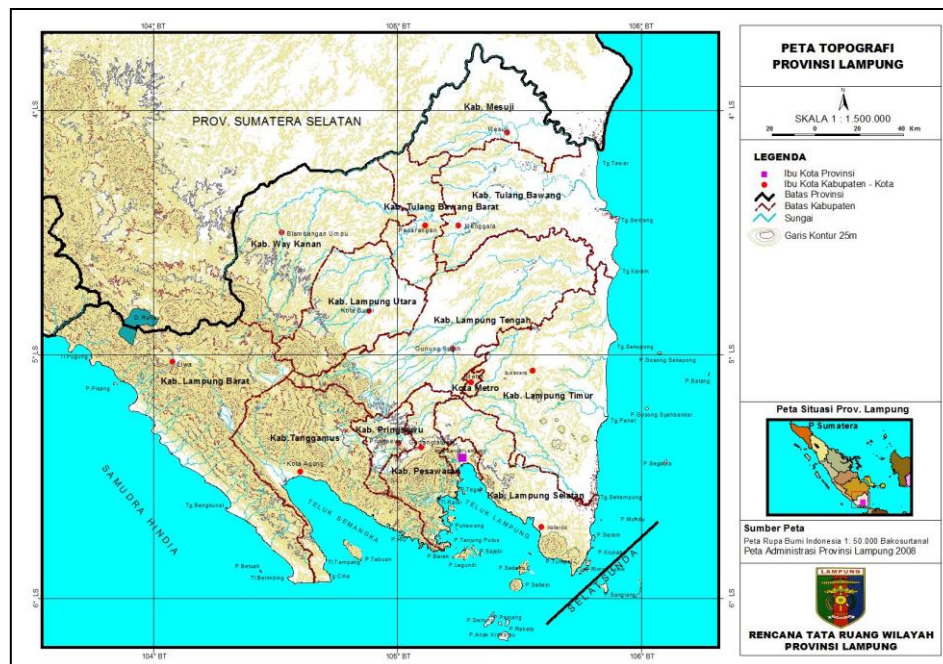


Gambar 0.1 Peta Administratif Provinsi Lampung

3.2 KONDISI FISIK ALAM

A. Kondisi Topografi

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: Daerah berbukit sampai bergunung, Daerah Berombak sampai bergelombang, Dataran alluvial, Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter d.p.l., dan Daerah aliran sungai. Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan.



Sumber RTRW Prov Lampung 2009-2029

Gambar 0.2 Peta Topografi Provinsi Lampung

B. Kondisi Geologi

Batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks *Gunungkasih (Ptgm)*. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batupasir dan batulempung dengan sisipan rijang dan batugamping dikenal dengan nama *Formasi Menanga (Km)*. Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai *Formasi Sabu (Tpos)* dan *Formasi Campang (Tpoc)*. Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai *Formasi Tarahan (Tpot)*, diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu.

Penunjaman-penunjaman yang terjadi telah menjadikan wilayah Kota Bandar Lampung sebagai area rawan bencana. Sehingga berdasarkan formasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan ruang dimasa yang akan datang. Dengan demikian perlu perencanaan mendalam untuk memanfaatkan ruang yang ada bagi pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah. Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang proses pembangunan yang dilakukan sejalan dengan keadaan wilayah yang rawan dengan bencana.

C. Kondisi Hidrologi

Sumberdaya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah River Basin. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Daerah *River Basin* ini meliputi: Daerah *River Basin* Tulang Bawang, Daerah *River Basin* Seputih, Daerah *River Basin* Sekampung, Daerah *River Basin* Semangka, Daerah *River Basin* Way Jepara. Secara hidrogeologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Gedong Meneng dan cekungan air tanah danau ranau. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu: Zona Aman Potensi Tinggi (*ZONA I*), Zona Aman Potensi Sedang (*ZONA II*), Zona Aman Potensi Kecil (*ZONA III*), Zona Imbuh / Resapan (*ZONA IV*), Zona Bukan CAT .

D. Struktur Geologi Dan Curah Hujan

Propinsi Lampung terletak di bawah katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 260C - 280C, dengan suhu maksimum sebesar 330C dan minimum sebesar 200C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.

3.3. PENGGUNAAN LAHAN

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

- b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati , ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya hingga tahun 2029 adalah 687,37 Km²
- d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan rawan bencana adalah 4.411,04 Km²
- e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah 355,83 Km²
- f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi

untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut:

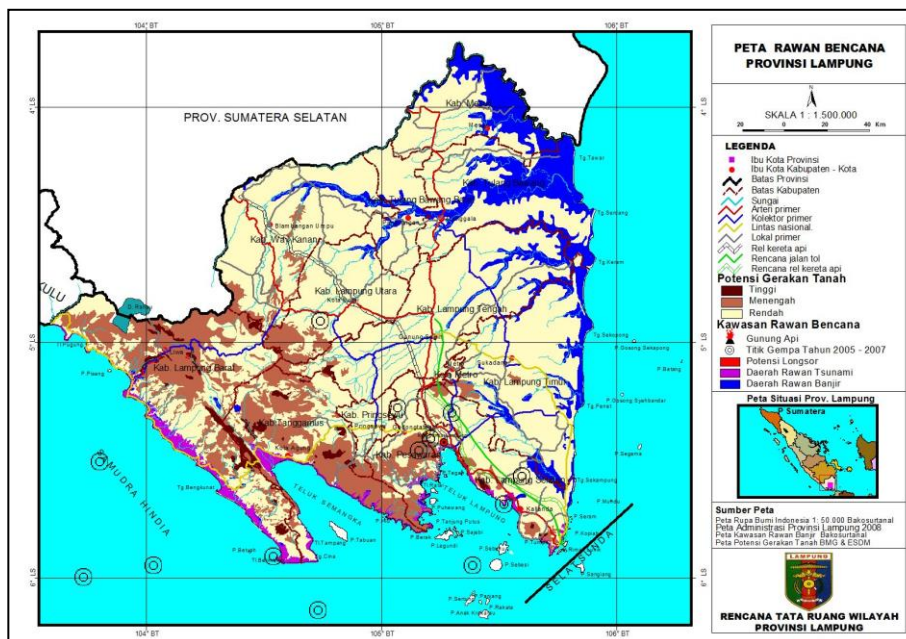
1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memiliki produktivitas optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian.
2. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan kecenderungan perkembangan hingga tahun 2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah.
3. Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik dan peternakan.

3.4. KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi:

1. Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur
3. Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.

4. Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik.



Sumber RTRW Prov Lampung 2009-2029

Gambar 0.2 Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung

3.5. KONDISI DEMOGRAFI

Berdasarkan data statistik tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 9.549.079. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk Provinsi Lampung, lihat tabel 3.1 :

Tabel 0.1 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2014

Kabupaten/ Kota	Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki - Laki	Perempuan		
Lampung Barat	155992	141261	297253	110
Tanggamus	329846	305243	635089	108
Lampung Selatan	652791	607344	1260135	107
Lampung Timur	571332	534658	1105990	107
Lampung Tengah	749328	700523	1449851	107
Lampung Utara	455519	423355	878874	108
Way Kanan	243728	229087	472815	106
Tulang Bawang	214003	201598	415601	106
Pesawaran	282446	260898	543344	108
Piringsweu	234771	218751	453522	107
Mesuji	161163	141567	302730	114
Tulang Bawang Barat	129418	121788	251206	106
Pesisir Barat	80588	73150	153738	10
Bandar Lampung	608081	559020	1167101	109
Metro	82029	79801	161830	103
Total	4951035	4598044	9549079	108

Sumber : Lampung dalam Angka, 2015

BAB IV

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

4.1. PENDEKATAN PENELITIAN

4.1.1 Urgensi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berikut merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kepentingan penyediaan ruang terbuka hijau :

- a) Pendekatan Ekologis (Pelestarian Lingkungan) ;Pendekatan ekologis dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan fungsi ekologis tata Ruang Hijau untuk meningkatkan fungsi konservasi lahan, tempat hidup satwa dalam rangka mengurangi limpasan (*run off*) air hujan.
- b) Pendekatan *Landscape*; Pendekatan landscape dalam pembangunan dan pengelolaan Tata Ruang Hijau Kota dimaksudkan bahwa fungsi landscape menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan fungsi secara fisik maupun sosial. Secara fisik Tata Ruang Hijau akan memberikan fungsi pendukung keindahan dan kenyamanan kawasan, secara sosial pengembangan Tata Ruang Hijau memberikan kemungkinan ruang bagi interaksi sosial.
- c) Pendekatan Estetis; Pendekatan estesis dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan untuk memberikan fungsi rekreatif karena keindahan, keselarasan, dan kenyamanan lingkungan.
- d) Pendekatan Ekonomis; Pendekatan ekonomis dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan mempertimbangkan kemungkinan nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan.
- e) Pendekatan Sosial; Pendekatan sosial dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dimaksudkan mempertimbangkan fungsi-fungsi sosial dari sebuah ruang terbuka hijau sebagai tempat bersosialisasi serta tempat beraktivitas masyarakat dan komunitas yang ada.

4.1.2. Konsepsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Di dalam Undang-undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) diatur mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH). Perbedaan antara RTH dan RTNH dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel **Error! No text of specified style in document.** 1 Perbedaan Antara Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau

No.	Pemahaman	Ruang Terbuka	
		Hijau	Non Hijau
1.	Definisi	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Ruang terbuka di wilayah kota/kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, yaitu berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air
2.	Tujuan Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> o menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; o menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; o meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 	
3.	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> o manfaat langsung (jangka pendek <i>-tangible</i>): membentuk keindahan dan kenyamanan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual. o manfaat tidak langsung (jangka panjang <i>-intangible</i>): pembersih udara yang efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati) 	<ul style="list-style-type: none"> o manfaat langsung: tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat (kegiatan olahraga, rekreasi, parkir, dll); keindahan dan kenyamanan (penyediaan plaza, monumen, <i>landmark</i>, dll); serta keuntungan ekonomis (retribusi parkir, sewa lapangan olahraga, dll). o manfaat tidak langsung: mereduksi permasalahan dan konflik sosial; meningkatkan produktivitas masyarakat; pelestarian lingkungan; serta meningkatkan nilai ekonomis lahan disekitarnya, dll.
4.	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> o fungsi utama (instrinsik), yaitu fungsi ekologis; o fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. 	<ul style="list-style-type: none"> o fungsi utama (instrinsik), yaitu fungsi sosial budaya; o fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu fungsi ekologis, fungsi ekonomis, fungsi arsitektural, dan fungsi darurat.

Sumber: Permen PU 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH dan Permen PU 12/2009 tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTNH

Keberadaan RTH dan RTNH bersifat saling melengkapi (komplementer). Dengan pengaturan kriteria perkerasan (RTH 70% : RTNH 30%), maka keberadaan RTNH akan mendukung fungsi ekologis RTH. Sumber: Permen PU 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTH dan Permen PU 12/2009 tentang Pedoman Penyediaan & Pemanfaatan RTNH

4.1.3. Prinsip Dasar Pengembangan RTH sebagai bagian dari Ruang Publik

Sebagai bagian dari ruang publik, RTH harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Menurut Stephen Carr, secara umum, ruang publik harus memenuhi tiga hal yaitu 1) responsif, 2) demokratis dan 3) bermakna. Responsif dalam arti ruang publik harus dapat digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna, berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi adalah kenyamanan, relaksasi, aktivitas aktif dan pasif, dan kemungkinan terjadinya pengalaman baru/discovery. Demokratis berkaitan dengan hak penggunaan ruang publik oleh pengguna, yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang

sosial, ekonomi dan budaya, serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Adapun bermakna dapat diartikan ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang dan dunia luas serta dengan konteks sosial.

Menurut Project for Public Space (www.pps.org), ruang publik yang ideal, termasuk di dalamnya ruang terbuka hijau publik, adalah dimana berbagai perayaan/celebrasi dapat dilaksanakan, terjadinya pertukaran/aktivitas sosial dan ekonomi, tempat bertemu masyarakat, dan percampuran kebudayaan. Ruang publik merupakan halaman depan bagi berbagai institusi publik, misalnya sekolah, perpustakaan, gedung/kantor pemerintahan, dll. Singkatnya, ruang publik merupakan panggung bagi kehidupan bersosialisasi masyarakat. Menurut PPS, apa yang membedakan tingkat kesuksesan sebuah ruang publik adalah keberadaan empat kualitas kunci sebagai berikut: Ruang publik harus aksesibel, Masyarakat terlibat dalam aktivitas di dalamnya, Ruang publik harus nyaman dan mempunyai image yang baik, dan Merupakan tempat yang mendukung pergaulan/sociable, dimana orang saling bertemu dan bersosialisasi.

4.2. METODOLOGI

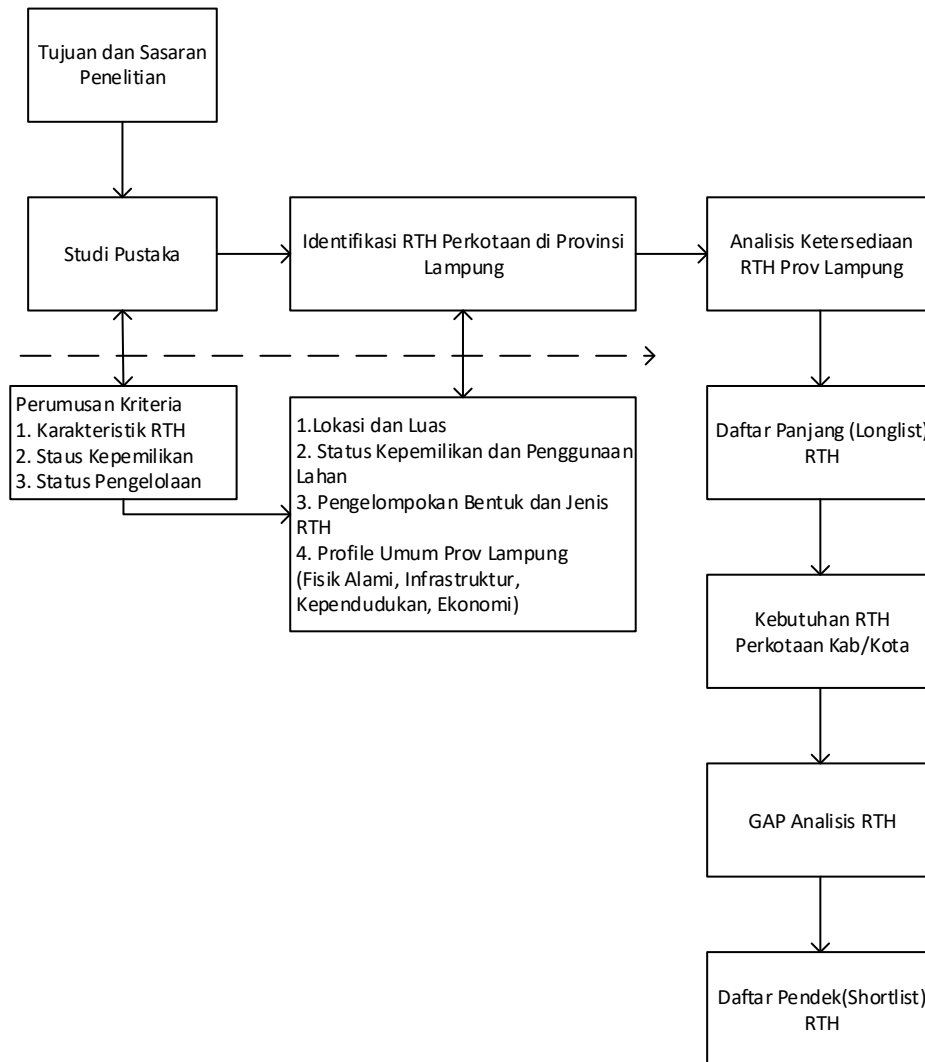
4.2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Pesatnya pembangunan perkotaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan menghasilkan berbagai permasalahan yang cukup rumit untuk diatasi. Tingkat pencemaran udara, air, dan tanah yang tinggi, kemacetan, terjadinya banjir, kemiskinan, menghasilkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Isu *climate change* atau perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur, maupun peningkatan frekuensi dan volume banjir yang juga diakibatkan oleh aktivitas manusia, merupakan ancaman global terhadap keberlangsungan kehidupan perkotaan dan wilayah sekitarnya. Selain itu meningkatnya kriminalitas, meningkatnya sifat individualistis, menurunnya produktivitas masyarakat, dan penurunan kualitas kesehatan dipengaruhi oleh terbatasnya ruang terbuka atau ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Sebagai ruang publik, RTH memiliki kepemilikan fungsi yang netral, dapat diakses oleh publik dan digunakan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok yang berbeda. Dengan demikian, ruang publik diharapkan dapat mempersatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.

Adapun beberapa faktor penyebab kegagalan sebuah RTH sebagai ruang publik adalah ketiadaan tempat berkumpul atau istirahat, akses masuk yang jelek atau tak terjangkau, sarana pendukung tidak berfungsi, dan ketiadaan 'nilai kebersamaan' pada ruang publik. Karena itu, sebuah ruang publik harus dikelola dengan tepat, mulai dari perencanaan, sampai tahap maintenance.

Dengan berpegang pada prinsip utama pengembangan ruang publik yang ideal, yaitu bersifat responsif (menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, dapat dipakai untuk berbagai aktivitas); demokratis (mudah diakses dan dapat diakses oleh semua pengguna); serta bermakna (adanya keterkaitan pengguna dengan ruang tersebut dan kawasan sekitarnya, konstektual), maka dapat terwujud pengembangan RTH di Provinsi Lampung beserta potensi pengembangan tematiknya. Kerangka pendekatan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar **Error! No text of specified style in document..**1 Alur Pikir Penelitian

4.2.2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dari studi. Adapun kegiatan persiapan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pemahaman persepsi terhadap latar belakang, tujuan dan sasaran penelitian, keluaran, ruang lingkup penelitian; serta metodologi penelitian
- 2) Mengumpulkan data awal mengenai kebijakan RTH, kajian teoritis mengenai RTH, serta gambaran umum RTH di Provinsi Lampung
- 3) Melakukan kajian awal terhadap kebijakan dan peraturan perundangan, landasan teoritis, serta studi preseden terkait RTH
- 4) Menyusun gambaran umum awal terkait RTH di Provinsi Lampung; serta
- 5) Merumuskan kriteria lokasi RTH prioritas.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari tahap persiapan penelitian ini adalah:

- 1) Pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran, dan ruang lingkup pelaksanaan penelitian.
- 2) Terhasilkannya metodologi pendekatan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan.
- 3) Terkajinya arahan kebijakan, konsep dan rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang telah dilakukan sebelumnya terkait RTH.
- 4) Terkajinya berbagai studi literatur untuk memperkuat ide/gagasan awal tipologi RTH dan potensi tematiknya.
- 5) Tersusunnya gambaran umum RTH di Provinsi Lampung termasuk identifikasi awal sebaran dan luasan RTH yang ada.
- 6) Terumuskannya kriteria yang dipakai untuk menentukan lokasi RTH.

Hasil yang diharapkan dari tahap persiapan adalah: adanya persepsi mengenai ke dalam kerangka pemikiran, metodologi pendekatan, kajian literatur mengenai definisi dan tipologi RTH, kajian kebijakan penataan ruang yang telah dilakukan terkait RTH, serta kriteria penentuan lokasi prioritas RTH.

Metoda yang digunakan pada tahap ini adalah kajian pustaka untuk memperkaya ide dan gagasan, stakeholder mapping untuk memetakan pihak-pihak yang terkait dengan substansi penelitian, *need assessment* untuk menentukan kebutuhan perencanaan dan penilaian sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan data dan kompilasi/pengolahannya.

B. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini melakukan kelanjutan dari penelitian dengan menekankan langkah pengumpulan data, termasuk pengolahannya untuk mendapatkan gambaran mengenai tipologi ruang publik sesuai kriteria yang telah dirumuskan.

Sasaran yang harus dicapai pada akhir tahap inventarisasi adalah:

- 1) Tersedianya data sekunder maupun primer yang dibutuhkan melalui survei instansi, wawancara, dan observasi lapangan.
- 2) Tersedianya hasil pengolahan data yang siap dianalisis.

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document.**2 Daftar Kebutuhan Data

Metode Pengumpulan Data	Aspek	Keterangan
Data Sekunder	Kebijakan dan perundang-undangan terkait RTH	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW Provinsi Lampung • RTRW kabupaten/kota terkait • Perda RTH • Permen PU RTH dan RTNH
	Studi terkait RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Studi literatur/landasan teoritis • Studi preseden
Data primer	Observasi lapangan	A. Struktur dan pola penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi RTH • Bentuk ruang publik • Hirarki penggunaan
		B. Fungsi dan Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi intrinsik • Fungsi ekstrinsik
		C. Status dan guna lahan <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan ruang publik • Guna lahan sekitar serta rencana ke depan • Status pengelolaan
	Wawancara	Narasumber terkait (Pemerintah, atau pengelola ruang publik, masyarakat, swasta, lainnya).

Keterangan:

* Diperlukan untuk tahap analisis yang lebih mendetail

Metode yang diperlukan dalam tahapan ini diantaranya adalah survey instansional, observasi/pengamatan lapangan, dan wawancara dengan narasumber.

C. Tahap Identifikasi dan Analisis Data

Kegiatan tahapan ini mencakup:

- 1) Melakukan deliniasi wilayah pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Lampung sebagai kawasan perkotaan
- 2) Merumuskan potensi pengembangan RTH di kawasan perkotaan Provinsi Lampung berdasarkan interpretasi peta citra melalui kategorisasi dan pembobotan jenis-jenis tutupan lahan yang berpotensi terhadap pengembangan RTH
- 3) Melakukan identifikasi RTH eksisting di kabupaten/kota di kawasan perkotaan Provinsi Lampung berdasarkan jenis, bentuk, kepemilikan lahan
- 4) Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan RTH kawasan perkotaan dengan melihat luas wilayah dan jumlah penduduk

- 5) Melakukan kajian terhadap rencana RTH berdasarkan arahan RTRW kawasan perkotaan
- 6) Melakukan analisis terhadap kebutuhan RTH dan ketersediaan RTH melalui potensi dan rencana tata ruang

Target yang diharapkan dari tahapan ini adalah adanya:

- 1) Identifikasi potensi RTH berdasarkan hasil interpretasi peta citra di kawasan perkotaan di Provinsi Lampung
- 2) Indikasi daftar RTH eksisting (jenis, bentuk, luas, status kepemilikan, pengelolaan) sebagai daftar panjang (long-list) di kawasan perkotaan di Provinsi Lampung
- 3) Identifikasi kebutuhan RTH kawasan perkotaan di Provinsi Lampung yang dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk
- 4) Evaluasi terhadap peruntukan RTH berdasarkan rencana pola ruang RTRW dan RDTR di kawasan perkotaan sebagai bahan strategi pencapaian RTH
- 5) Hasil Gap analysis antara kebutuhan RTH kawasan perkotaan dengan ketersediaan eksisting RTH dengan melihat potensi dan rencana pola ruang

Metode yang diperlukan dalam tahapan ini diantaranya adalah analisis pengindraan jauh, analisis *content*, analisis proyeksi kebutuhan RTH, *expert judgement*, *gap analysis*.

4.2.3. Metode/ Teknik Analisis

A. Metode Umum yang digunakan

Pelaksanaan penelitian penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Kabupaten Solok Selatan secara garis besar dilakukan melalui beberapa metoda, yaitu antara lain :

- a. *Metoda Deskriptif Eksploratif*; metoda ini dilakukan melalui teknik survey guna memperoleh data-data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lapangan dalam bentuk pengukuran, pemotretan, pembuatan gambar peta dan rekaman situasi lingkungan serta wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Untuk menampung aspirasi masyarakat maka tim pewawancara akan meminta pendapat kepada masyarakat sekitar lokasi perencanaan, tokoh masyarakat, bahkan pengambil kebijakan.
- b. *Metoda Olah Data (processing method)*. Data-data akan diolah sesuai dengan pengelompokannya. Pengelompokan data dibedakan menjadi dua yaitu; pengolahan data verbal dan data grafikal. Olahan ini dilakukan dengan komputer guna mempermudah dan mempercepat waktu penelitian.

- c. *Metoda Statistical*; data-data yang memerlukan olahan statistik dilakukan melalui program komputer seperti trend pertumbuhan penduduk dan lain-lain yang membutuhkan prediksi beberapa tahun ke depan.
- d. *Metoda Pengukuran dan Pemetaan* yang bersifat survey pemetaan menggunakan peralatan penunjang seperti GPS, dan meteran untuk menghasilkan data spasial. Untuk Identifikasi tutupan lahan Eksisting dilakukan denganmetoda Remote Sensing, sedangkan untuk pemetaan digital dilakukan dengan program ArcGIS.
- e. *Metoda Analisis* menggunakan program-program komputer grafis ArcGis untuk analisis Spasial.

B. Survey Dan Analisis Spasial

1. Hasil Pengumpulan Data Spasial

Proses pengumpulan data sekunder spasial dilakukan berbarengan dengan pengumpulan data non spasial pada saat survei.

2. Perbaikan Survey Spasial

Untuk menjaga kualitas hasil intepretasi peta citra eksisiting, maka perlu dilakukan survei groundcheck lahan secara sampling. Groundcheck ini dilakukan dua kali yaitu pertama ketika semua proses analisis GIS selesai dilakukan dan kedua ketika semua proses evaluasi GIS selesai dilakukan. Survei ground check dilakukan untuk memastikan apakah hasil klasifikasi citra satelit sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Survei ini dilakukan dengan cara menentukan lokasi titik-titik survei yang mewakili seluruh kelas lahan yang tampak pada citra satelit. Jumlah titik survei setiap kelas lahan direncanakan sebanyak tiga titik. Alat yang diperlukan untuk survei ini adalah Peta kerja dan GPS handheld Navigasi. Peta kerja digunakan untuk membandingkan hasil pengolahan citra di studio dengan kondisi real di lapangan. Sedangkan GPS dapat membantu dalam navigasi sebagai peralatan tambahan GPS.

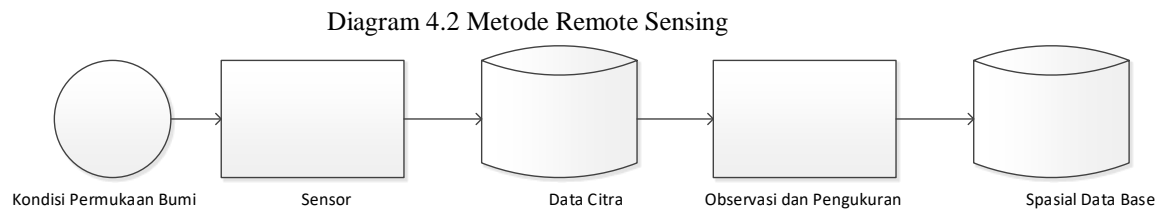
3. Groundcheck

Kegiatan Survey juga dilakukan menyebar di wilayah penelitian. Kegiatan terdiri dari survey lapangan dengan mengunjungi 28 titik pengamatan yang dipilih dengan menyesuaikan dengan hasil analisis GIS. Titik-titik yang dipilih merupakan titik yang dikategorikan memiliki potensi ketidaksesuaian.

C. Penginderaan Jauh

1. Penginderaan jauh dan Citra Landsat 8

Penginderaan jauh atau inderaja (remote sensing) adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,1979).



Bagan alur diatas menunjukkan pengambilan data dengan metode penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang digunakan pada penelitian ini adalah Citra Landsat 8 dan SPOT-6. Dalam kegiatan ini proses lebih dititik beratkan menggunakan Landsat sedangkan sebagai pembanding digunakan data SPOT hal ini dikarenakan resolusi spektral landsat lebih baik dibandingkan resolusi spektral SPOT. Satelit LDCM (Landsat-8) dirancang membawa sensor pencitra OLI (Operational Land Imager) yang mempunyai 1 kanal inframerah dekat dan 7 kanal tampak reflektif, akan meliputi panjang gelombang yang direfleksikan oleh objek-objek pada permukaan Bumi, dengan resolusi spasial yang sama dengan Landsat pendahulunya yaitu 30 meter. Sensor pencitra OLI mempunyai kanal-kanal spektral yang menyerupai sensor ETM+ (Enhanced Thermal Mapper plus) dari Landsat-7, akan tetapi sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal yang baru yaitu : kanal-1: 443 nm untuk aerosol garis pantai dan kanal 9 : 1375 nm untuk deteksi cirrus, namun tidak mempunyai kanal inframerah termal. Untuk menghasilkan kontinuitas kanal inframerah termal, pada tahun 2008, program LDCM (Landsat-8) mengalami pengembangan, yaitu Sensor pencitra TIRS (Thermal Infrared Sensor) ditetapkan sebagai pilihan (optional) pada misi LDCM (Landsat-8) yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI.

2. Image Enhancement

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Landsat 8 memiliki 11 band. Diantaranya band Visible, Near Infrared (NIR), Short Wave Infrared (SWIR), Panchromatic dan Thermal. Band 1,2,3,4,5,6,7 dan 9 mempunyai resolusi spasial 30 meter, band 8 mempunyai resolusi spasial 15 meter, sementara band 10 dan 11 resolusi spasialnya 100 meter.

Untuk memaksimalkan data Landsat 8, penggabungan antara resolusi 30 meter menjadi 15 meter sangatlah bermanfaat. Terutama untuk mempertajam obyek dalam melakukan analisis visual. Ini

yang sering disebut proses image enhancement. Pada umumnya proses ini sering dilakukan di software Remote Sensing.

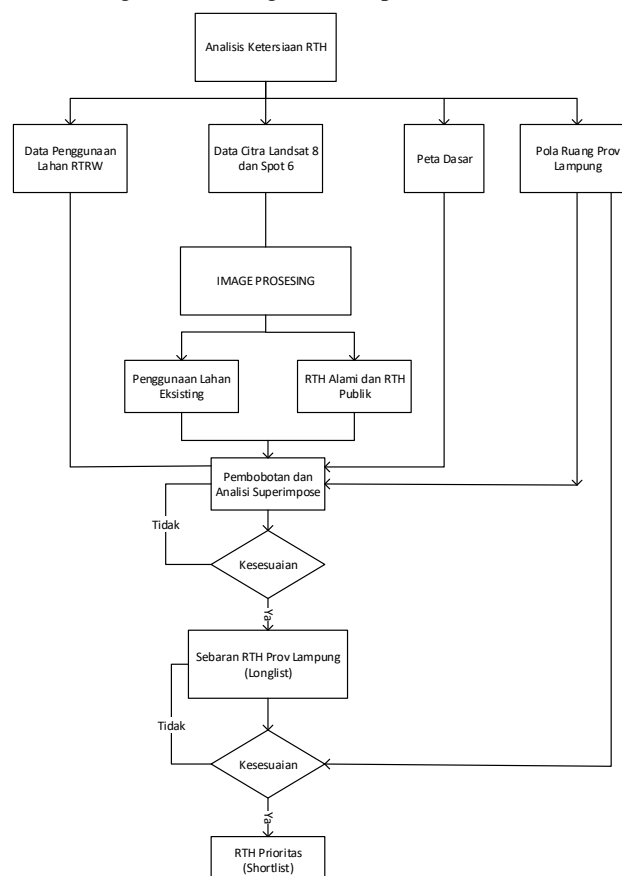
3. Klasifikasi Citra Dengan Metode Supervised Classification dan Unsupervised Classification

Teknik klasifikasi supervised dapat diartikan sebagai teknik klasifikasi yang diawasi. Menurut Projo Danoedoro (1996) klasifikasi supervised ini melibatkan interaksi analis secara intensif, dimana analis menuntun proses klasifikasi dengan identifikasi objek pada citra (training area). Sehingga pengambilan sampel perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pola spektral pada setiap panjang gelombang tertentu, sehingga diperoleh daerah acuan yang baik untuk mewakili suatu objek tertentu.

D. Pendekatan Dan Teknik Analisis Kesesuaian Lahan Berbasis Gis

Dalam analisis berbasis GIS pembuatan peta dasar atau peta kerja mutlak dilakukan sebagai representasi data eksisting dari peta rencana. Pembuatan peta kerja ini merupakan pengolahan dari peta citra satelit. Tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Diagram 4.3 Diagram Tahapan Analisis GIS



E. Analisis Overlay Kesesuaian

Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam analisis kesesuaian lahan RTH adalah melakukan overlay antara peta rencana (RTRW) dengan peta kondisi aktual (peta citra satelit terbaru). Hasil overlay ini akan menjadi alat bantu dalam merumuskan kesesuaian, dan tingkat simpangan.

Teknik Analisis data dilaksanakan melalui *Geography Information System* (GIS) dan *Remote Sensing* (Penginderaan Jauh).

Secara garis besar tahapan kegiatan terdiri dari

- a. Registrasi Citra
- b. Pembuatan Peta Citra
- c. Interpretasi Citra
- d. Klasifikasi Citra
- e. Pembentukan Data Spasial penggunaan lahan.
- f. Penyusunan Data Atribut
- g. Analisis *overlay* yang meliputi analisis:

- i. Analisa perubahan Penggunaan Lahan

Untuk Menghitung dan menentukan perubahan penggunaan lahan RTH dalam kurun waktu tertentu. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

- Melakukan *superimpose* Peta lahan RTH baru dan Peta lahan RTH lama.
- Menginventarisasi luas, jenis dan letak perubahan lahan RTH pada kurun waktu tertentu untuk menyederhanakan penyajian data, dilakukan reklasifikasi jenis penggunaan lahan.

- ii. Analisa kesesuaian penggunaan lahan RTH terhadap RTRW

Analisa kesesuaian penggunaan lahan RTH terhadap RTRW dapat menunjukkan kemajuan implementasi tata ruang pada lahan yang telah digunakan untuk berbagai kegiatan. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

- iii. Ketersediaan Lahan RTH

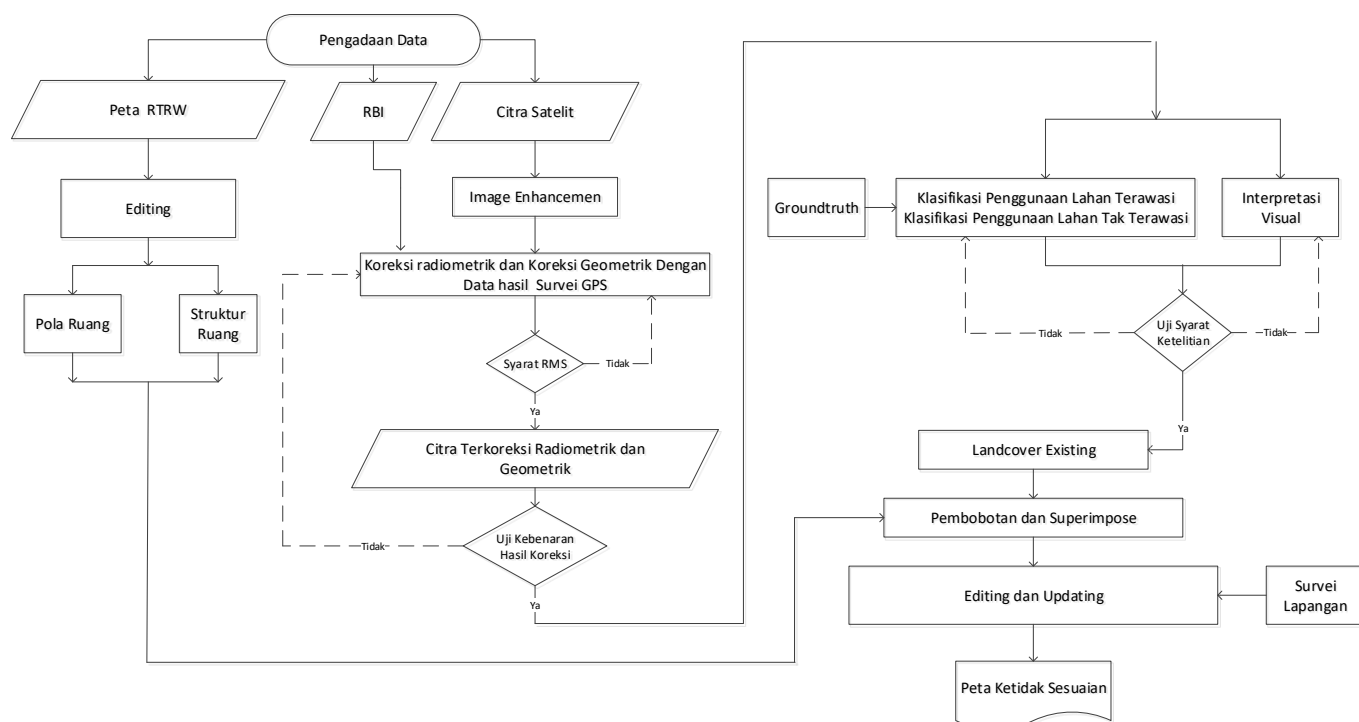
Analisa Ketersediaan Lahan menunjukkan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH sesuai dengan tata ruang. Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut:

- Melakukan *overlay* (tumpang-tindih) Peta Lahan RTH baru dan Peta Lahan RTH Lama..
- Mendeskripsikan luas dan letak lahan-lahan yang tersedia untuk RTH.
- Terhadap lahan-lahan RTH yang beralihfungsi dianalisa berdasarkan kesesuaiannya dengan RTRW perlu dilakukan berbagai kajian dalam rangka

penyesuaian dengan tata ruang. Analisa ini dilakukan melalui *overlay* (tumpang-tindih) lahan-lahan yang dapat dikategorikan tidak tersedia.

- Mendeskripsikan luas dan letak lahan-lahan RTH yang sudah ada dan penggunaan lahan yang sesuai dengan tata ruang dan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
- Untuk menyimpulkan hasil analisa dan menyajikannya secara lebih informatif, hasil analisa pada Peta Ketersediaan Lahan RTH dalam Tata Ruang.

Gambar 4.4 Tahapan Pelaksanaan Analisis Remote Sensing untuk Peta Kesesuaian RTH



F. Metode Perhitungan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

1. Analisa Kebutuhan RTH Berdasarkan Persentasi Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- RTH di perkotaan terdiri dari RTH privat dan RTH publik
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan dan perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

2. Analisa Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita

sesuai peraturan yang berlaku yaitu *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008*.

3. Analisa Kebutuhan RTH Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Kebutuhan RTH kota berdasarkan kebutuhan oksigen dapat dihitung berdasarkan pendekatan Gerakis seperti pada rumus berikut ini :

$$Lt = \frac{At+Bt}{54 \times 0,9375 \times 2}$$

- Lt = Luas hutan kota pada tahun ke-t (ha)
 At = Jumlah kebutuhan oksigen bagi penduduk pada tahun ke-t
 Bt = Jumlah kebutuhan oksigen bagi kendaraan bermotor pada tahun ke-t
 54 = Konstanta yang menunjukkan bahwa 1 m luas lahan menghasilkan 54 gr berat kering tanaman per hari (konstanta ini merupakan hasil rata-rata dari semua jenis tanaman baik berupa pohon, semak/belukar, perdu ataupun padang rumput)
 0,93 = Konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gr berat kering tanaman adalah setara dengan produksi oksigen 0,9375 gr.
 2 = Jumlah musim di Indonesia

Rumus tersebut menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Setiap orang mengkonsumsi oksigen dalam jumlah yang sama setiap hari, yaitu ± 600 liter (86.400 kg) per hari (Smith et al tahun 1981 dalam Wisesa, 1988).
2. Kebutuhan oksigen oleh kendaraan bermotor yaitu 11,63 kg/jam untuk kendaraan penumpang, kendaraan bus 45,76 kg/jam, kendaraan beban 22,88 kg/jam dan sepeda motor sebesar 0,58 kg/jam (Wisesa, 1988).
3. Waktu aktif kendaraan bermotor ialah: kendaraan penumpang 3 jam/hari, kendaraan bis dan kendaraan beban 2 jam/hari, serta sepeda motor 1 jam/hari (Wisesa, 1988).
4. Kendaraan bermotor hanya beroperasi di dalam kawasan perkotaan saja.
5. Suplai oksigen hanya dilakukan oleh tanaman.
6. Tidak ada angin darat dan angin laut.

4. Analisa Kebutuhan RTH Berdasarkan Kebutuhan Air

Kebutuhan air dalam kota tergantung dari faktor kebutuhan air bersih pertahun, jumlah air yang dapat disediakan oleh PAM, potensi air saat ini, dan kemampuan RTH menyimpan air. Berdasarkan angka kebutuhan air tersebut lebih lanjut dapat dihitung luas RTH kota yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat kota.

$$L = \frac{Po.K(1+r-c)t - PAM - Pa}{z}$$

- L = Luas hutan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air (Ha)
 Po = Jumlah penduduk kota pada tahun ke
 k = Konsumsi air per kapita (liter/hari)
 r = Laju kebutuhan air bersih (biasanya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk kota setempat)
 t = Tahun
 c = Faktor koreksi (besarnya tergantung dari upaya pemerintah dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk)
 PAM = Kapasitas suplai air oleh PAM (dalam m³/Tahun)
 Pa = Potensi air tanah saat ini
 z = Kemampuan lahan menyimpan air (dalam m³/Tahun)

Asumsi :

Pertumbuhan rata-2 jumlah sambungan per tahun berdasarkan studi corporate plan adalah sebesar 6.000 sr/tahun sedangkan kondisi eksisting pertumbuhan sr dari tahun 2002 s/d 2005 adalah = 1.565
 Dengan mempertimbangkan : (1). Penambahan jumlah sr di wil pusat kota sudah mencapai titik jenuh ; (2). Potensi pelanggan di wil pinggiran sangat kecil maka diasumsikan pertumbuhan rata-2 sr /tahun sebesar 2.500 sr untuk TKA disesuaikan dengan kondisi eksisting dan rencana pengurangan TKA.

BAB V

ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RTH DI PROVINSI LAMPUNG

5.1 IDENTIFIKASI RTH EKSISTING

5.1.1 RTH Taman dan Hutan Kota

RTH taman terbagi menjadi 2 yaitu RTH taman lingkungan dan RTH taman kota. RTH taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak disekitar daerah permukiman dan perumahan untuk menampung kegiatan-kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

RTH Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman di beberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.



Gambar 5.1 RTH Taman Lingkungan



Gambar 5.2 RTH Taman Kota

RTH Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.



Gambar 5.3 RTH Hutan Kota

5.1.2 RTH Jalur Hijau Jalan

RTH Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan.



Gambar 5.4 RTH Jalur Hijau Jalan

5.1.3 RTH Fungsi Tertentu

RTH dengan fungsi tertentu: sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel, dan pemakaman.

- *Sempadan pantai*; Sempadan pantai adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari pantai, terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam.
- *Sempadan sungai*; Sempadan sungai adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam.
- *Sempadan rel*; Sempadan rel adalah RTH yang berfungsi sebagai batas rel kereta api terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari kereta api.
- *Pemukaman*; Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka di wilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Ketersediaan sarana penunjang (jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir, dan lainnya) di lokasi pemakaman juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan.



Gambar 5.5 Sempadan Pantai



Gambar 5.6 Sempadan Sungai



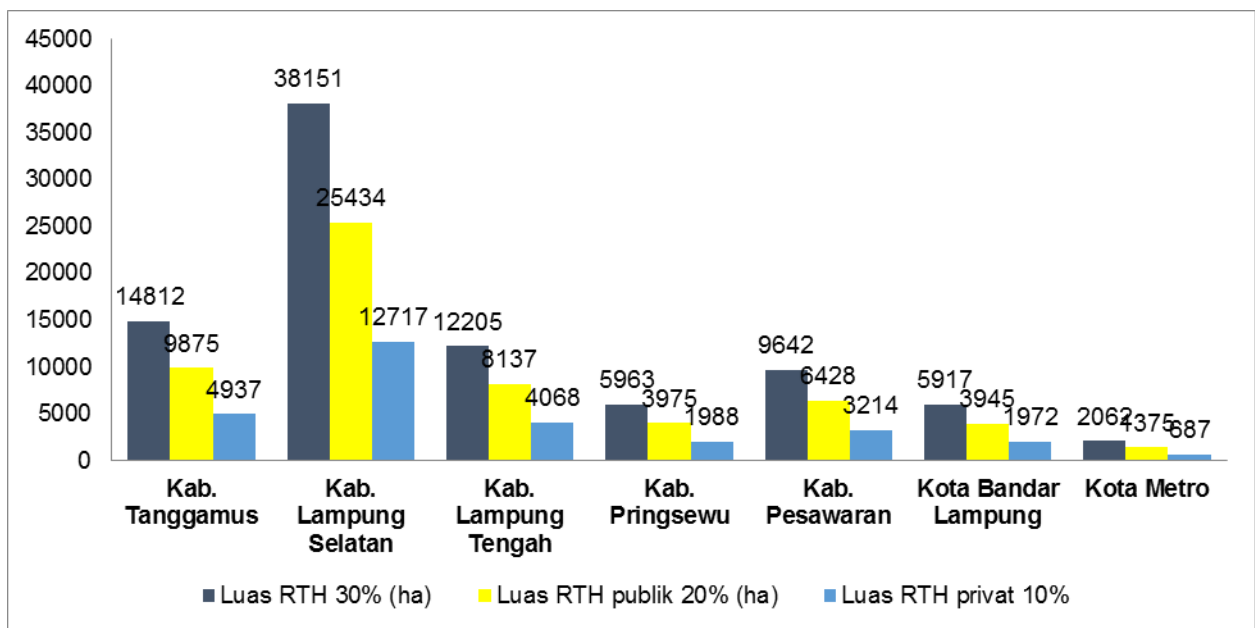
Gambar 5.7 Sempadan Rel



Gambar 5.8 Pemakaman

5.2 KEBUTUHAN RTH DI PROVINSI LAMPUNG

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% dari luas wilayah, yang terbagi menjadi 20% luas RTH publik dan 10% RTH privat. Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah paling besar memiliki kebutuhan RTH paling luas dengan RTH publik seluas 25,434ha dan RTH privat seluas 12,717ha. Kota Metro merupakan kota di Provinsi Lampung dengan jumlah kebutuhan RTH paling sedikit dengan luas RTH publik 1,375ha dan RTH privat 687ha.



Sumber : Hasil Analisis, 2016

Gambar 5.9 Grafik Kebutuhan RTH Berdasarkan Presentase 30% Luas Kawasan

Potensi RTH eksisting yang terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung berupa Sempadan, Jalur Hijau, dan lainnya. Berdasarkan ketersediaan potensi RTH, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi tertinggi dengan luas sempadan 1,164ha, luas jalur hijau

102ha, dan lainnya 26,130ha. Kota Metro merupakan kota dengan potensi RTH paling sedikit dengan luas sempadan 6ha, jalur hijau 6ha, dan lainnya 1.77ha.

Berdasarkan luas potensi RTH eksisting dan luas kebutuhan RTH, maka baru 2 (dua) kabupaten/kota yang sudah mencukupi yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tangganus. Sementara untuk 5 (lima) kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro masih belum mencukupi antara kebutuhan RTH dengan potensi RTH yang ada.

Tabel 5.1 Gap Kebutuhan dan Penyediaan RTH

Kab/Kota	LUAS KEBUTUHAN (ha)			LUAS POTENSI RTH (ha)				Keterangan
	RTH publik 20%	RTH privat 10%	Total luas RTH 30%	Sempadan	Jalur hijau	Lainnya*	Total	
Kab. Tanggamus	9,875	4,937	14,812	307	16	18,746	19,069	Sudah mencukupi
Kab. Lampung Selatan	25,434	12,717	38,151	2,563	216	21,306	24,085	Belum mencukupi
Kab. Lampung Tengah	8,137	4,068	12,205	805	165	5,026	5,996	Belum mencukupi
Kab. Pringsewu	3,975	1,988	5,963	109	26	7,793	7,928	Sudah mencukupi
Kab. Pesawaran	6,428	3,214	9,642	1,164	102	26,130	27,396	Sudah mencukupi
Kota Bandar Lampung	3,945	1,972	5,917	227	24	978	1,229	Belum mencukupi
Kota Metro	1,375	687	2,062	6	6	1,77	12	Belum mencukupi
Total	59,168	29,584	88,752	5,181	554	79,979	85,715	

Keterangan= * termasuk RTH lainnya adalah hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, semak, semak belukar, savana, lahan terbuka, pertanian lahan kering campur semak

Sumber : Hasil Analisis, 2016

5.3 SYARAT/KRITERIA PEMILIHAN RTH KAWASAN PERKOTAAN

Syarat/kriteria pemilihan RTH Kawasan Perkotaan berdasarkan 5 pertimbangan, yaitu:

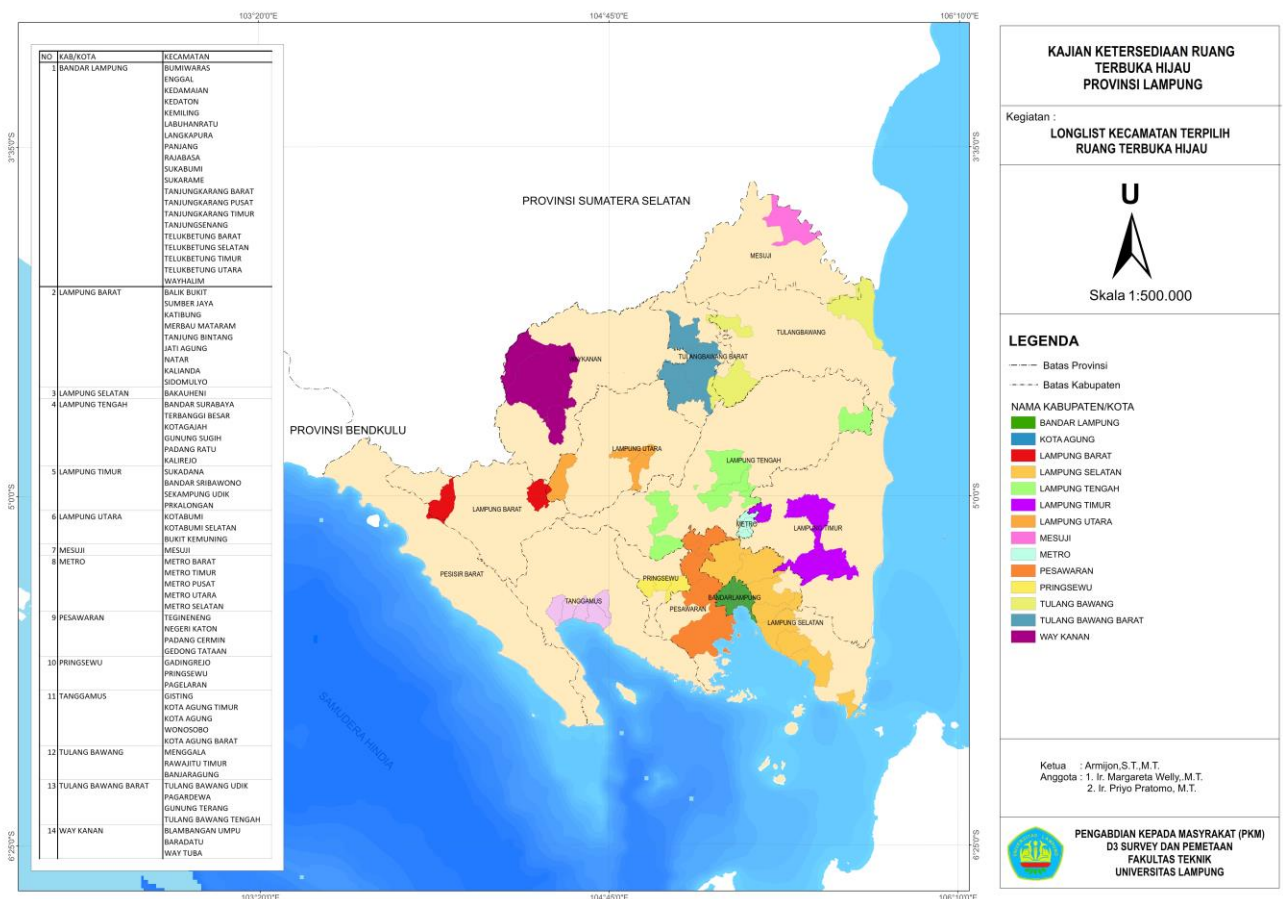
- **Kedalaman Muatan RTH dalam RTRW**
penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW dan Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat serta daya dukung : Keberadaan DED, Potensi fungsi RTH ekstrinsik, dan Potensi fungsi RTH intrinsic
- **Aksesibilitas**
Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitekural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lokasi RTH terbaik berdekatan dengan pusat kegiatan dan Terletak di jalan Arteri Primer atau Kolektor Primer
- **Kepemilikan**

Berdasarkan kepemilikan status lahan, berupa RTH milik masyarakat, proses penyerahan ke Pemkab, dan milik Pemkab.

- **Pengelolaan**
RTH sudah memiliki pengelola atau tidak ada pegelola. Serta keberadaan komunitas hijau sebagai bagian dari pengelola RTH.
- **Kesiapan Lahan**
Kejelasan visi pemerintah setempat terhadap pengembangan/pembangunan RTH

5.4 LAHAN RTH POTENSIAL (DAFTAR PENDEK RTH)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan kriteria serta ditunjang dengan survei langsung kelokasi potensi potensi RTH diseluruh kabupaten kota di provinsi lampung untuk pemilihan RTH prioritas, maka terdapat 18 (delapan belas) titik lahan RTH potensial di Kawasan Perkotaan Provinsi Lampung, yaitu:



Gambar 5.10 Sebaran Potensi RTH Hasil Analisis Remote Sensing dan GIS

Tabel 5.2 Delapan belas titik lahan RTH potensial

KABUPATEN/KOTA	NAMA	KECAMATAN
1.Tanggamus	1.RTH Teluk Semangka	Kel.Baros, Kota Agung
	2.RTH Kwsn Pendidikan SMA 2	Pugung, Kota Agung
	3.RTH Gisting	Gisting
2.Lampung Selatan	1.RTH dekat Makam Pahlawan (Exit Tol Kalianda)	Kec.Kalianda
	2.RTH hutan kota (sebelah SMK 2)	Kec. Kalianda
3.Lampung Tengah	1. Lapangan Olahraga Masjid Al Hidayah	Kec. Terbanggi Besar
	2.Taman Hijau	Kec. Terbanggi Besar
4.Pringsewu	1.Area Gerbang Selamat Datang	Pekon Wates
	2.Lap. Kuncup	Kel.Pringsewu Barat, Pringsewu
	3.RTH pendopo (dpn Tugu Bambu)	Pusat kota
5.Pesawaran	1.Spot-spot <i>waterfront</i>	Kec. Padang Cermin
	2.RTH Kebagusan	Desa Kebagusan
	3.RTH Ds Negeri Sakti	Ds Kurungan Nyawa, Kec. Gedong Tataan
6.Kota Metro	1. Dam Way Raman	Purwoasri, Metro Utara
	2. Bumi Perkemahan	Kec. Metro Selatan
	3. Taman Ki Hajar Dewantoro	
7. Kota Bandarlampung	1.Lap Kemiling	Kec. Kemiling
	2.Kebun Bibit	Kec. Kemiling

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dengan Remote sensing dan GIS terhadap 15 kabupaten kota dihasilkan tabel Longlist peta sebaran potensi RTH diseluruh 14 perkotaan provinsi lampung. Dikarenakan belum tersedianya data RTRW dan data pendukung lainnya untuk kabupaten Pesisir Barat maka pada kabupaten termuda di provinsi lampungtersebut tidak dapat dilakukananalisis untuk meng hasilkan sebaran RTH di perkotaan.

Hasil Analisis terhadap sebarah RTH dari 14 kabupaten kota(tabel Longlist) menghasilkan 7 lokasi RTH prioritas (tabel Shortlist) untuk segera dikembangkan. Ketujuh lokasi tersebut adalah

1. Kota Bandar Lampung (Lap Kemiling, Kebun Bibit)
2. Kota Metro (Dam Way Raman, Bumi Perkemahan, Taman Ki Hajar Dewantoro)
3. Kabupaten Pesawaran (Spot-spot *waterfront*, RTH Kebagusan, RTH Desa Negeri Sakti)
4. Kabupaten Pringsewu (Area Gerbang Selamat Datang, Lap. Kuncup, RTH pendopo /dpm Tugu Bambu)
5. Kabupaten Tanggamus (RTH Teluk Semangka, RTH Kwsn Pendidikan SMA 2, RTH Gisting)
6. Kabupaten Lampung Tengah (Lapangan Olahraga Masjid Al Hidayah, Taman Hijau)
7. Kabupaten Lampung Selatan (RTH Kwasan didekat Makam Pahlawan /Exit Tol Kalianda, RTH hutan kota / disebelah SMK 2)

Dari peta eksisting sebaran RTH Provinsi Lampung dan tabel hasil perhitungan luasan RTH terlihat hampir disebagian besar perkotaan diprovinsi lampung memiliki RTH kurang dari 30%

Hasil sandingan RTH RTRW dengan Eksisting terlihat kecenderungan terus menurunnya jumlah dan kualitas RTH di perkotaan Provinsi Lampung.

6.2. SARAN

Hasil Analisis pada tabel Shortlist perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menghasilkan analisis pengurutan lebih rinci prioritas kebutuhan RTH sehingga dapat terkelaskan seluruh tabel shortlist, pada akhirnya dapat menjadi dokumen usulan rencana pengembangan RTH yang dapat berguna bagi pemerintah provinsi lampung atau pihak terkait lainnya dalam melakukan aksi pengembangan RTH di perkotaan secara bertahap.

Perlu dilakukan kajian khusus bagi kabupaten pesisir barat dimasa mendatang, terkait sebagai kabupaten termuda yang sangat minim data pendukungnya mengakibatkan di penelitian ini belum dapat terpetakan potensi sebaran RTH perkotaan pada wilayah tersebut.

Perlu strategi dan kebijakan pengembangan RTH untuk menghasilkan pencapaian menuju RTH 30% dengan upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Penetapan areal pertanian lahan kering, pertanian lahan basah dan perkebunan sbg RTH cadangan.
2. Pembangunan lahan hijau baru dan perluasan RTH melalui pembelian lahan.
3. Pengembangan koridor ruang hijau.
4. Akuisisi RTH privat agar dijadikan RTH kota.
5. Penghijauan atap bangunan.
6. Insentif dan Disinsentif.

Perlu dilakukan tindakan untuk mempertahankan Luasan dan Meningkatkan Kualitas RTH dengan cara:

1. Penetapan areal potensi RTH dalam pola ruang sebagai upaya mempertahankan luasan RTH.
2. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting
3. Pengembangan RTH multifungsi, aksesibel, berkarakter unik dan estetis.
4. Penataan RTH eksisting yang berkontribusi terhadap pembangunan kota berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arronof, S., 1989, *Geographic Information System : A Management Perspective*. WDL Publication Ottawa, Canada.
- Lillesand, Thomas M. and Ralph W. Kiefer. 1994. *Remote Sensing and Image Interpretation*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UUBG
- RTRW Kota Bandar Lampung.
- RTRW Kabupaten Lampung Barat
- RTRW Kabupaten Lampung Selatan
- RTRW Kabupaten Lampung Tengah
- RTRW Kabupaten Lampung Timur
- RTRW Kabupaten Lampung Utara
- RTRW Kota Metro
- RTRW Kabupaten Mesuji
- RTRW Kabupaten Pesawaran
- RTRW Kabupaten Pesisir Barat
- RTRW Kabupaten Pringsewu
- RTRW Kabupaten Tanggamus
- RTRW Kabupaten Tulang Bawang
- RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat
- RTRW Kabupaten Way Kanan
- RTRW Provinsi Lampung.
- Short, Nicholas M., 1982. *The Landsat Tutorial Workbook*, NASA, New York.
- Sutanto. 1987. Metode Penelitian Penginderaan Jauh Untuk Geografi. *Makalah Ceramah Untuk Staf Pengajar UMS Surakarta*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PERSONALIA PENELITIAN

Pelaksana Kegiatan Penelitian ini adalah dosen pada Program Studi Diploma III Teknik Survei dan Pemetaan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung yang terdiri atas :

1. Ketua Peneliti:

- a. Nama : Armijon, S.T., M.T
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 197304102008011008
- d. Disiplin Ilmu : T. Geodesi
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1/ IIIb
- f. Jabatan Fungsional/Struktural : Asisten Ahli
- g. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
- h. Program Studi : D3 Teknik Survei dan Pemetaan
- i. Waktu Penelitian : 48 jam/minggu

2. Anggota Peneliti:

- a. Nama : Ir. Priyo Pratomo, M.T
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 195309261985031003
- d. Disiplin Ilmu : Teknik Sipil
- e. Pangkat/Golongan : Pembina /VIa
- f. Jabatan Fungsional/Struktural : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
- h. Program Studi : D3 Teknik Survei dan Pemetaan
- i. Waktu Penelitian : 48 jam/minggu

3. Anggota Peneliti:

- a. Nama : Ir.Margareta Welly, M.T
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 195504021990032001
- d. Disiplin Ilmu : Teknik Sipil
- e. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
- f. Jabatan Fungsional/Struktural : Lektor
- g. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
- h. Program Studi : D3 Teknik Survei dan Pemetaan
- i. Waktu Penelitian : 48 jam/minggu

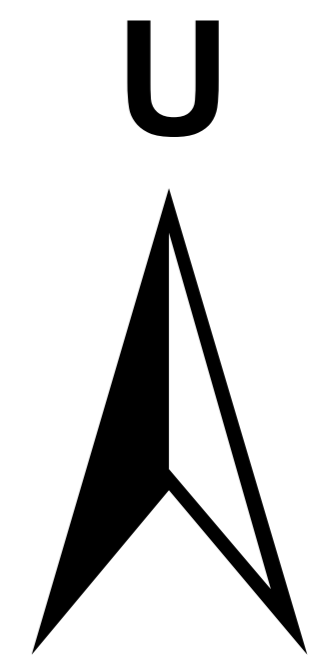
104°0'0"E

105°0'0"E

106°0'0"E

KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PROVINSI LAMPUNG

PETA ADMINISTRASI PROVINSI LAMPUNG



Skala 1:350.000

LEGENDA

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Jalan TOL
- Rencana Jalan TOL
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kereta Api
- Sungai
- Danau
- Tepi Pantai

KABUPATEN/KOTA

- Kota Bandar Lampung
- Lampung Barat
- Lampung Selatan
- Lampung Tengah
- Lampung Timur
- Lampung Utara
- Mesuji
- Kota Metro
- Pesawaran
- Pesisir Barat
- Pringsewu
- Tanggamus
- Tulang Bawang
- Tulang Bawang Barat
- Way Kanan

Ketua : Armijon, S.T., M.T.
 Anggota : 1. Ir. Margareta Welly, M.T.
 2. Ir. Priyo Pratomo, M.T.



PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (PKM)
 D3 SURVEY DAN PEMETAAN
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG

4°0'0"S

5°0'0"S

6°0'0"S

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI BENGKULU

SAMUDERA INDONESIA

40000

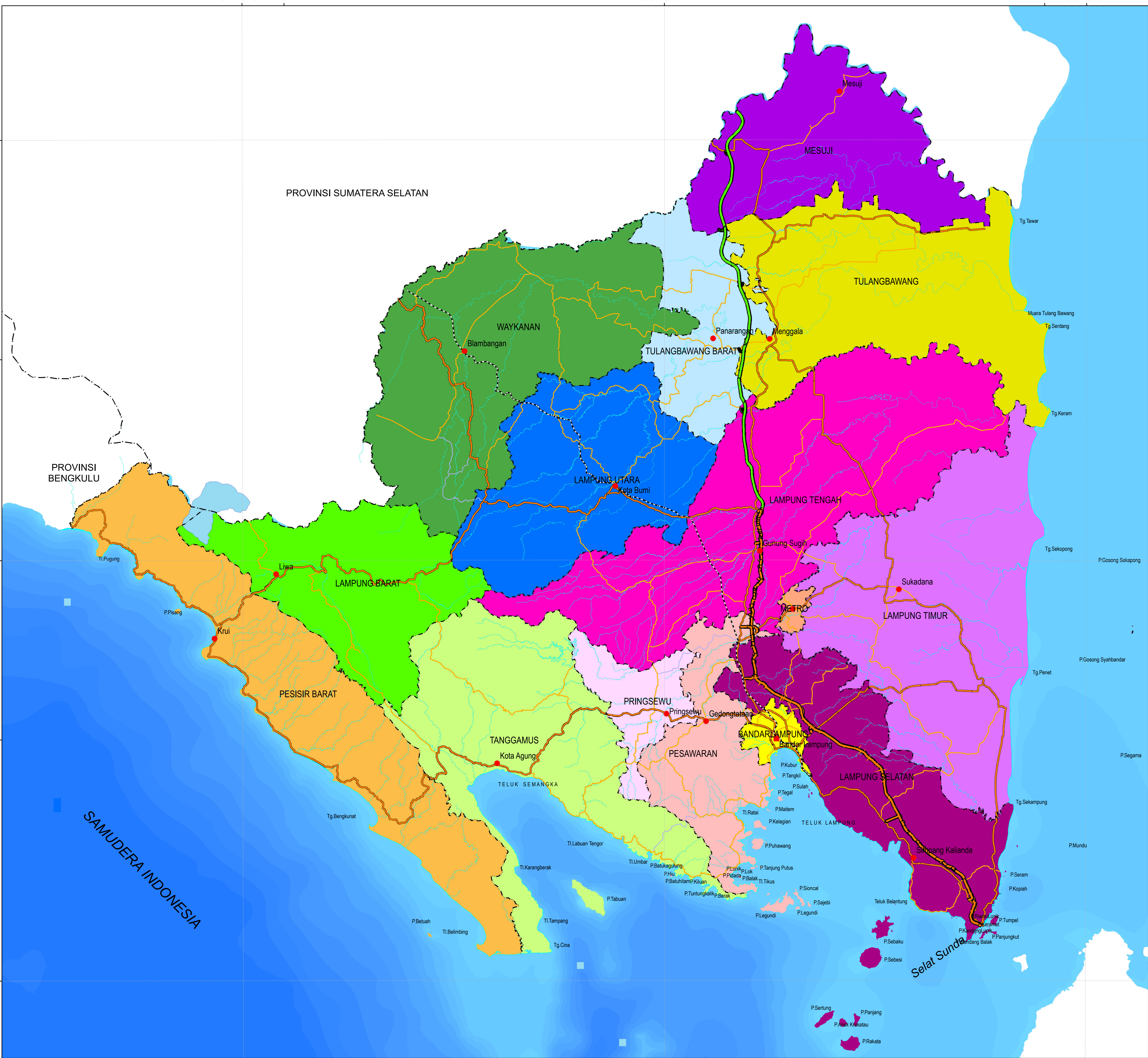
50000

60000

950000

940000

Selat Sunda



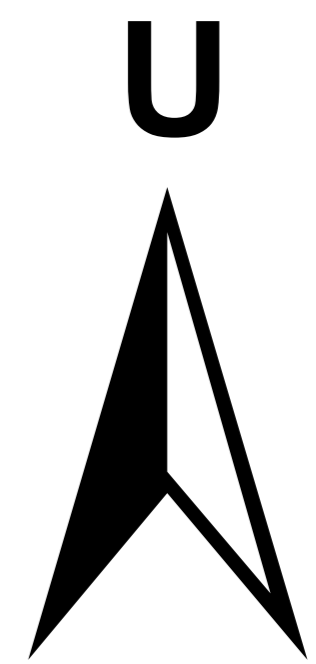
104°0'0"E

105°0'0"E

106°0'0"E

KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PROVINSI LAMPUNG

PENGUNAAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG



Skala 1:350.000

LEGENDA

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Strategis Provinsi
- Jalan Kereta Api
- Sungai
- Danau

PENGUNAAN LAHAN

- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Rawa Sekunder
- Industri
- Lahan Terbuka
- Perkebunan
- Permukiman
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Campur Semak
- Savanna
- Sawah
- Semak
- Semak Belukar
- Tambak
- Tubuh Air

Ketua : Armijon, S.T., M.T.
 Anggota : 1. Ir. Margareta Welly, M.T.
 2. Ir. Priyo Pratomo, M.T.



PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (PKM)
 D3 SURVEY DAN PEMETAAN
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG

4°0'0"S

5°0'0"S

6°0'0"S

400000

500000

600000

9500000

9400000

SAMUDERA INDONESIA

Selat Sunda

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI BENGKULU

P.Sertung P.Panjang
 P.Anek Krakatau
 P.Rakata

P.Mundu
 P.Seram
 P.Kopah

P.Segama
 P.Gosong Syahbandar
 Tg. Penet

P.Gosong Sekapong
 Tg. Sekapong

Tg. Keram
 Tg. Serdang
 Muara Tulang Bawang

Tg. Tawar

P.Kubur
 P.Tangkai
 P.Tegal
 P.Matem
 P.Kalagian
 P.Puhawang
 P.Tanjung Putus
 P.Tanjung Lank
 P.Palaka
 P.Tikus
 P.Soncal
 P.Sajeji
 P.Legundi
 P.Legundi

P.Tabung
 P.Tabung
 P.Tabung

Tg. Cna
 Tg. Cna
 Tg. Cna

Tg. Bengkunt
 Tg. Bengkunt
 Tg. Bengkunt

P.Pisang
 P.Pisang
 P.Pisang

Ti. Pugung
 Ti. Pugung
 Ti. Pugung

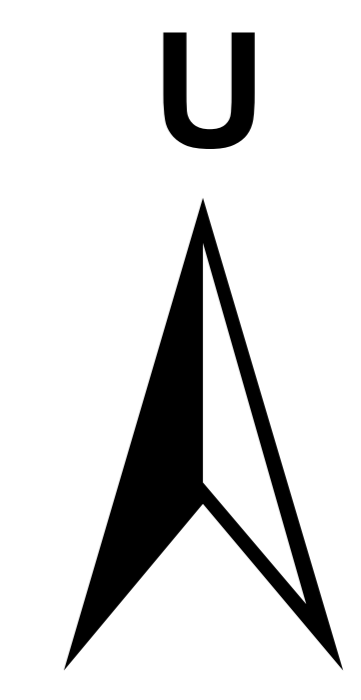
104°0'0"E

105°0'0"E

106°0'0"E

KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PROVINSI LAMPUNG

POLA RUANG PROVINSI LAMPUNG



Skala 1:350.000

LEGENDA

- Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Jalan TOL
 - Rencana Jalan TOL
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - - - - - Jalan Kereta Api
 - Sungai
 - Danau
- Kawasan Lindung**
- Kawasan Hutan Suaka
 - Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Lindung Bagi Daerah ibawahnya
 - Kawasan Lindung Bagi Daerah Setempat
 - Kawasan Lindung Daerah Rawan Bencana
- Kawasan Budidaya**
- Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi
 - Kawasan Peruntukkan Industri
 - Kawasan Peruntukkan Perikanan
 - Kawasan Peruntukkan Perkebunan
 - Kawasan Peruntukkan Permukiman
 - Kawasan Peruntukkan Pertanian
 - Kawasan Peruntukkan Pertambangan
 - Kawasan Peruntukkan Pariwisata
 - ✕ Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Ketua : Armijon, S.T., M.T.
 Anggota : 1. Ir. Margareta Welly, M.T.
 2. Ir. Priyo Pratomo, M.T.



PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT (PKM)
D3 SURVEY DAN PEMETAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

4°0'0"S

5°0'0"S

6°0'0"S

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NSI ULU

SAMUDERA INDONESIA

Selat Sunda

40000

50000

60000

9500000

9400000

103°20'0"E

104°45'0"E

106°10'0"E

3°35'0"S

3°35'0"S

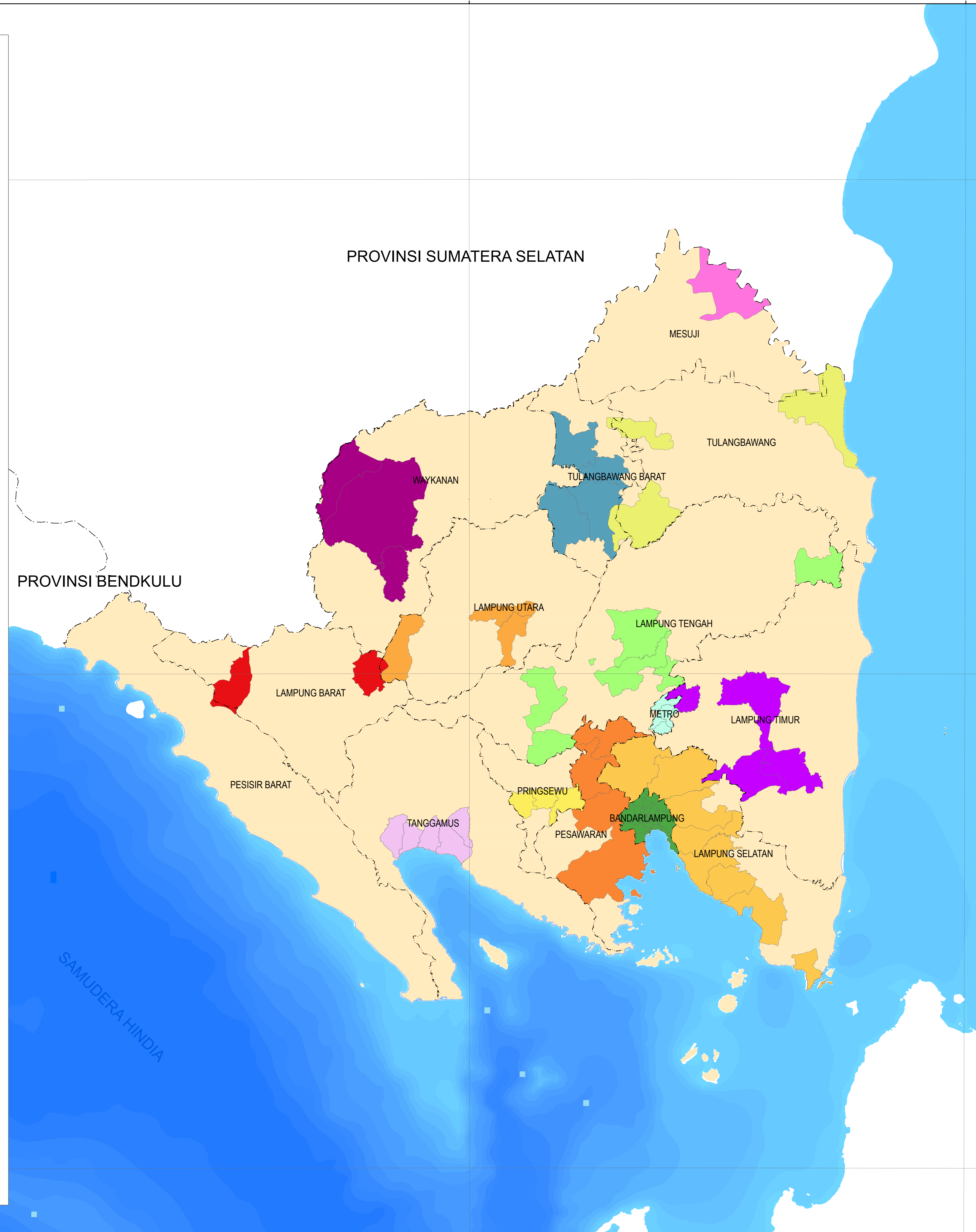
5°0'0"S

5°0'0"S

6°25'0"S

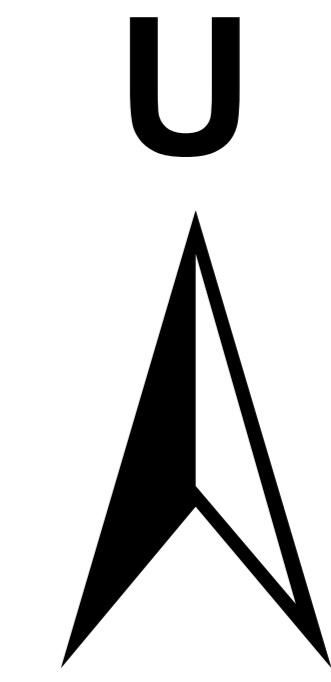
6°25'0"S

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN		
1	BANDAR LAMPUNG	BUMIWARAS		
		ENGGAL		
		KEDAMAIAN		
		KEDATON		
		KEMILING		
		LABUHANRATU		
		LANGKAPURA		
		PANJANG		
		RAJABASA		
		SUKABUMI		
		SUKARAME		
		TANJUNGPUSAT		
		TANJUNGPUSAT		
		TANJUNGPUSAT		
2	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT		
		SUMBER JAYA		
		KATIBUNG		
		MERBAU MATARAM		
		TANJUNG BINTANG		
		JATI AGUNG		
3	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI		
		4	LAMPUNG TENGAH	BANDAR SURABAYA
				TERBANGGI BESAR
5	LAMPUNG TIMUR	SUKADANA		
		BANDAR SRIBAWONO		
6	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI		
		KOTABUMI SELATAN		
7	MESUJI	MESUJI		
		8	METRO	METRO BARAT
METRO TIMUR				
METRO PUSAT				
METRO UTARA				
METRO SELATAN				
9	PESAWARAN	TEGINENENG		
		NEGERI KATON		
		PADANG CERMIN		
		GEDONG TATAAN		
10	PRINGSEWU	GADINGREJO		
		PRINGSEWU		
		PAGELARAN		
11	TANGGAMUS	GISTING		
		KOTA AGUNG TIMUR		
		KOTA AGUNG		
		WONOSOBO		
12	TULANG BAWANG	MENGGALA		
		RAWAJITU TIMUR		
		BANJARAGUNG		
13	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK		
		PAGARDEWA		
		GUNUNG TERANG		
		TULANG BAWANG TENGAH		
14	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU		
		BARADATU		
		WAY TUBA		



KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PROVINSI LAMPUNG

Kegiatan :
LONGLIST KECAMATAN TERPILIH RUANG TERBUKA HIJAU



Skala 1:500.000

LEGENDA

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- NAMA KABUPATEN/KOTA
- BANDAR LAMPUNG
- KOTA AGUNG
- LAMPUNG BARAT
- LAMPUNG SELATAN
- LAMPUNG TENGAH
- LAMPUNG TIMUR
- LAMPUNG UTARA
- MESUJI
- METRO
- PESAWARAN
- PRINGSEWU
- TULANG BAWANG
- TULANG BAWANG BARAT
- WAY KANAN

Ketua : Armijon, S.T., M.T.
 Anggota : 1. Ir. Margareta Welly, M.T.
 2. Ir. Priyo Pratomo, M.T.



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
D3 SURVEY DAN PEMETAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

103°20'0"E

104°45'0"E

106°10'0"E